



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Mei 2010

Nomor : SE. 205 /Seskab/V/2010
Sifat : Biasa
Lampiran : ---
Perihal : Arahan Presiden Dalam
Pemeliharaan Hutan dan
Perubahan Iklim Hasil
Kesepakatan Pemerintah
Indonesia dan Norwegia

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet
Indonesia Bersatu – II
2. Jaksa Agung Republik
Indonesia
3. Panglima Tentara Nasional
Indonesia
4. Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia

di-

Jakarta

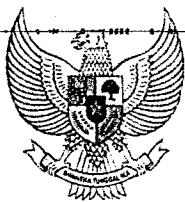
Presiden dan delegasi Indonesia telah melakukan kunjungan kerja ke Oslo, Norwegia, sejak tanggal 26 sampai 28 Mei 2010 untuk meluncurkan Kerjasama Bilateral Indonesia dan Norwegia di bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim, serta menjadi *Co-Chair* (Ketua Bersama) pada Konferensi Internasional di bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim yang diikuti lebih dari 50 negara.

Dari beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain, penandatanganan *Letter of Intent* Kerjasama Indonesia – Norwegia yang dilakukan tanggal 26 Mei 2010 siang hari. Kerjasama ini akan membantu Indonesia dalam mengelola sumber daya hutan secara lestari sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca yang keluar dari kegiatan deforestasi dan kerusakan lahan gambut. Nilai pendanaan kerjasama ini adalah 1 (satu) milyar dollar AS dan bentuk pendanaannya adalah hibah.

Pendanaan dari kesepakatan kerjasama ini, selain dari Norwegia, juga merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dengan menggunakan dana sendiri, melalui pendanaan APBN.

Kunjungan kerja ke Oslo ini merupakan hal yang penting karena:

1. Sebagai penghargaan terhadap komitmen sukarela Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 26% dari tingkat bisnis seperti biasa pada tahun 2020, Presiden diminta untuk menjadi *Co-Chair* bersama Perdana Menteri Norwegia pada Konferensi Kehutanan dan Perubahan Iklim di Oslo pada tanggal 27 Mei 2010.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

2. Konferensi Kehutanan dan Perubahan Iklim ini dihadiri setidaknya oleh 8 (delapan) Kepala Negara, dan juga oleh Pangeran Charles dan George Soros. Konferensi ini bertujuan untuk memudahkan terbentuknya mekanisme pendanaan yang akan mempercepat upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui peningkatan kualitas pengelolaan hutan dan pengurangan laju *deforestasi*.
3. Konferensi di Oslo ini sejalan dengan keputusan UNFCCC mengenai REDD+ dan merupakan langkah penting untuk memajukan proses negosiasi di UNFCCC menuju Pertemuan Para Pihak UNFCCC ke 16 di Cancun, Mexico akhir tahun ini.
4. Indonesia memahami perlunya melakukan perannya untuk menghadapi tantangan global yang mendesak ini untuk memerangi perubahan iklim. Sebagai negara berkembang, dan negara kepulauan dari 17.000 pulau, penduduk kita akan menghadapi bahaya dari dampak perubahan iklim.
5. Kemitraan REDD+ yang inovatif ini akan memungkinkan lebih banyak investasi hijau bagi perkembangan ekonomi Indonesia dan sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca, untuk membantu upaya memperkuat lembaga-lembaga pemerintah dan untuk membantu lebih jauh usaha pengurangan emisi karbon.

Dari hasil pertemuan bilateral dengan Pemerintah Norwegia dan Konferensi Kehutanan dan Perubahan Iklim di Oslo pada tanggal 27 Mei 2010, Presiden telah memberikan arahan kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah yang ikut dalam Rombongan Presiden ke Oslo untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai oleh Pemerintah Indonesia dan Norwegia dalam upaya pemeliharaan hutan dan perubahan iklim. Untuk itu Presiden memberikan arahan dalam menyusun langkah pelaksanaannya pada lingkup: bilateral (misalnya Indonesia-Norwegia, dan secara bilateral juga bisa dengan negara sahabat lain yang berminat), kemitraan (*public-private partnership cooperation*), dan multilateral (mengajak lembaga internasional seperti organisasi-organisasi di bawah PBB, *World Bank*, ADB dan lainnya).

Presiden menginginkan dalam kerjasama pemeliharaan hutan dan lingkungan, serta upaya mengatasi masalah perubahan iklim, kita memberi perhatian (fokus) pada langkah tindak yang nyata. Utamanya agar apa yang telah kita tetapkan sebagai kerjasama dalam memelihara lingkungan terutama di sektor kehutanan dapat berjalan dengan baik.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Presiden memberikan arahan mengenai *mindset* (kerangka berpikir) yang harus kita bangun dalam kerjasama bilateral maupun multilateral dalam pengelolaan hutan sebagai berikut:

1. *Partnership* antara RI-Norwegia harus diletakan sebagai bagian dalam aksi nasional pemeliharaan hutan. Jangan dibalik. Kerjasama RI-Norwegia menjadi bagian utuh dari aksi nasional dalam pengelolaan hutan kita;
2. Ketika kita menetapkan sasaran pengurangan emisi gas rumah kaca, dari kemitraan ini, maka angka ini harus menjadi bagian dari target pengurangan 26% sampai 41% sebelum 2020. Apabila menggunakan Sumber Daya sendiri dapat dicapai pengurangan 26%, dan jika dibantu internasional harapannya adalah bisa mencapai 41%. Mari kita letakan sasaran itu, dan diperhitungkan dengan seksama agar kerjasama ini berjalan dengan baik;
3. *Partnership* RI-Norwegia harus berhasil. Mengapa? karena ini sesungguhnya implementasi dari pertemuan di Copenhagen. Secara khusus di *Copenhagen Accord* ada *chapter* yang menyangkut kerjasama pengurangan GRK disumbang oleh usulan RI dalam *Accord* tersebut. Kita akan malu kalau ini diadopsi oleh dunia tapi tidak berhasil untuk dijalankan oleh kita sendiri, padana hali itu demi kepentingan kita sendiri. Sementara, Norwegia juga menjalankan kerjasama yang serupa dengan Brazil, jadi tidak hanya Indonesia;
4. Indonesia harus lebih baik dan lebih berhasil daripada Brazil dalam memelihara hutan tropisnya. Kenapa harus berhasil? Karena oleh dunia, Indonesia saat ini dinilai sebagai salah satu *leader* dalam urusan Perubahan Iklim. Sebagai contoh, Achim Steiner (UNEP) dan Hellen Clarke (UNDP) mengakui peran RI sebagai salah satu *leader* dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan Perubahan Iklim. Ini artinya kita diberi tanggung jawab dan dipercaya oleh masyarakat internasional, sehingga kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah menjadi *leader* kegiatan Kehutanan dan Perubahan Iklim. Selama ini proyek skala nasional yang kita jalankan untuk *Climate Change*, belum 100% berhasil, oleh karena itu sekarang adalah saatnya, kita harus 100% berhasil.
5. Apabila ini berhasil, kerjasama yang sama akan dapat kita lakukan dengan negara-negara lainnya, karena telah ada sebuah negara maju yang telah membuktikan keseriusan untuk melakukan kerjasama ini.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Presiden berharap dalam upaya pelaksanaan pemeliharaan hutan dan mengatasi masalah dalam perubahan iklim, "*Failure is not an option*". Oleh karena itu faktor yang bisa membuat kegagalan harus kita cegah, misalnya:

1. Pengorganisasian yang tidak tepat.
2. Tidak dilibatkan dan diperankannya segenap pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. Bila salah satu tidak terlibat akan mengganggu jalannya kegiatan ini.
3. Rencana aksi yang tidak *workable*. Rencananya bagus tapi tidak bisa dijalankan.
4. Rencana aksi sudah baik tapi masih mungkin gagal karena implementasinya tidak habis-habisan (*all out*) untuk mencapai target.
5. Pendanaan yang tidak memadai dan tidak tepat waktu.
6. Sistem MRV yang tidak *credible* dan efektif.
7. Salah satu bentuk kegagalan adalah bila masyarakat lokal tidak mendapat apa-apa dari kerjasama ini. Gagal adalah bila masyarakat lokal tidak mendapatkan kompensasi apapun.
8. Kepemimpinan sangat penting, terutama di tingkat pelaksanaan yang paling depan, misalnya: Bupati, Camat. Mereka adalah pemimpin yang paling depan, yang dengan supervisi Gubernur, mereka akan jauh lebih baik.
9. Manakala timbul pemberitaan pers dan statemen dari LSM yang negatif, karena kurang komunikasi antara kita dan teman LSM/Pers dan pemberitaan dibesar-besarkan, sehingga ditangkap negatif oleh Norwegia, akan membuat program kita seperti tidak berhasil. Poin Presiden adalah pentingnya melakukan komunikasi dan konsultasi, sehingga yang diberitakan adalah fakta. Apabila ada kritik yang muncul, kita cek dan ucapkan terimakasih pada LSM dan pers.
10. Pengawasan perlu penggunaan sistem *reward* dan *punishment*.

Langkah yang harus dilakukan, antara lain:

1. Segera membentuk badan pelaksana, seperti BRR, yang melapor langsung ke Presiden.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

2. Pembentukan insitusi dan system MRV, yang secara internasional dapat diterima, dengan menguatkan aspek Informasi Teknologi dan Komunikasi (*ICT*).
3. Susun RAN 2010-2014:
 - a. Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)
 - b. Kegiatan uji coba (*pilot project*) di tingkat propinsi
 - c. Kegiatan skala penuh di tingkat nasional (*nation wide*)
4. Moratorium pemberian ijin baru bagi konversi lahan gambut dan hutan alam. Hutan menjadi perhatian khusus pemerintah pusat (*central government*), sehingga akan kita kontrol.
5. Pengiriman tim untuk studi banding ke Brazil supaya apa yang kita lakukan tidak saja tepat, bahkan akan lebih bagus.
6. Segera dilakukan sosialisasi atau komunikasi dengan dunia usaha yang berhubungan (*connected*) dengan sektor kehutanan.
7. Konsultasi dan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah. Harus sampai tingkat kabupaten. Karena pejabat di daerah adalah pejabat yang mengelola permasalahan di tingkat paling depan.
8. Konsultasi dengan LSM dan komunitas adat yang ada kaitannya dengan proyek ini. Cari LSM yang berfungsi sebagai *part of solution*.
9. Menetapkan lembaga keuangan yang nanti akan mengurus pendanaan. Tidak harus lembaga keuangan internasional, juga bias lembaga keuangan nasional sepanjang *credible* dan akuntabel.

Kesembilan tindakan di atas harus dirampungkan dalam 2010, Menko Perekonomian akan mengkoordinasikan kegiatan ini.

Presiden akan aktif pada kegiatan monitoring di lapangan dan pelaksanaannya. Presiden akan meminta laporan secara berkala. Karena kegiatan ini menyangkut kehormatan bangsa dan negara, jangan sampai kita dianggap lalai, karena ini juga untuk kemaslahatan rakyat kita dan juga penduduk sedunia.

Presiden akan melakukan kunjungan lapangan. Segera setelah ditetapkan propinsi dan kabupaten yang termasuk dalam kegiatan uji coba, dengan kelengkapan informasi mengenai luasan wilayah hutan di dalamnya, dan rencana program kegiatan serta capaian



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

yang ingin dicapai pada pelaksanaannya, Presiden akan langsung meninjau di lapangan.

Presiden minta dipresentasikan agar rencana aksi kerjasama dalam pemeliharaan hutan yang ada kaitannya dalam upaya kita dalam mengatasi permasalahan akibat perubahan iklim dapat dibahas bersama di Sidang Kabinet Paripurna.

Mari kita sukseskan secara bersama, dan Presiden mengharapkan agar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat melibatkan universitas, contoh: Universitas Andalas, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan lainnya yang bisa ikut menyukseskan program besar ini.



Tembusan Yth:

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Bapak Wakil Presiden, sebagai laporan.